

Kebijakan Pertanian dan Dukungan Departemen Pertanian Terhadap Implementasi Otonomi Daerah.

Pendahuluan

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran strategis dalam perkembangan struktur perekonomian nasional. Selain sebagai penghasil produksi pangan dan pembentuk Produk Domestik Bruto (PDB), sektor pertanian juga menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, sumber bahan baku industri, cadangan devisa, dan pendapatan masyarakat. Dengan memberikan kesempatan kerja dan menjadi sumber pendapatan sebagian besar penduduk di pedesaan, secara tidak langsung sektor pertanian juga telah ikut berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh sebab itu sektor ini layak dipromosikan menjadi sektor andalan.

Fakta menunjukkan, pembangunan pertanian masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan. Salah satu diantaranya adalah terkait dengan penurunan kapasitas sumberdaya pertanian. Pada kondisi permintaan produk pertanian yang makin tinggi seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat, serta berkembangnya pusat kota-industri-wisata, kapasitas sumberdaya pertanian terutama lahan dan air justru makin terbatas dan mengalami degradasi. Luas baku lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan pertanian baru sangat lambat sementara konversi lahan pertanian semakin tidak terkendali. Ketersediaan air untuk pertanian semakin fluktuatif dengan kualitas yang menurun akibat kerusakan alam dan persaingan antar sektor ekonomi.

Masalah lain adalah sistem adopsi atau alih teknologi pertanian yang lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru dan pengembangan teknologi yang sudah ada ke tingkat petani. Otonomi daerah telah membawa perubahan drastis terhadap sistem alih teknologi pertanian. Jumlah penyuluh mengalami penurunan tajam dari 36.626 orang sebelum desentralisasi menjadi 19.636 orang pada akhir tahun 2003. Kondisi tersebut menyebabkan menurunnya kelancaran arus penyampaian teknologi karena intensitas interaksi antara peneliti, penyuluh, dan petani melemah.

Akses petani terhadap modal sangat penting dalam meningkatkan kinerja usahatani. Penyebaran aplikasi teknologi anjuran sangat tergantung terhadap penyediaan modal. Ketidakkampuan masyarakat pertanian di pedesaan mengakses permodalan dari lembaga keuangan formal selama ini disebabkan oleh ketersediaan lembaga keuangan formal terbatas, prosedur dan persyaratan dinilai sangat sulit, tingkat suku bunga yang tinggi, serta kurang sesuai sistem lembaga keuangan formal dengan sifat kegiatan usaha pertanian yang musiman.

Sistem pemasaran hasil pertanian belum efisien dan adil karena : (1) rantai tataniaga yang panjang; (2) timbulnya margin ganda dan pembagian margin yang tidak adil; (3) kemampuan petani menyimpan produk terbatas, serta (3) struktur pasar yang timpang, di mana petani menghadapi struktur pasar oligopolistik pada pasar input dan oligopsonistik pada pasar output.

Permasalahan serius lain dalam pembangunan pertanian adalah rendahnya kualitas sumberdaya manusia. Kemajuan pendidikan SDM pertanian

berjalan lambat. Hingga tahun 2005 tenaga kerja di sektor pertanian yang tidak tamat SD masih 29.8 %, tamat SD 46 %, dan tamat SLTP 16.5 %. Pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap rendahnya penguasaan ketrampilan, kemampuan mengembangkan kearifan lokal disamping pola pikir yang praktis, dengan orientasi usaha jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat dan belum memiliki wawasan bisnis yang luas.

Dengan berbagai permasalahan tersebut kondisi petani kita masih memprihatinkan. Mereka masih termasuk dalam gugus 55 persen dari total penduduk miskin yang secara nasional jumlahnya mencapai 36.1 juta dengan sekitar 24 juta diantaranya tinggal di pedesaan. Di tingkat mikro, skala penguasaan lahan yang relatif sempit menjadi kendala rumahtangga untuk keluar dari perangkap kemiskinan. Upaya mencari pendapatan tambahan dari kegiatan lain masih terbatas karena ketersediaan lapangan kerja non pertanian di pedesaan relatif kurang. Oleh sebab itu, prioritas pembangunan ke depan dalam penanggulangan kemiskinan nasional selayaknya diberikan pada sektor pertanian dan dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan kawasan pedesaan.

Beberapa Capaian Pembangunan Sebagai Refleksi Kinerja Sektor

Di tingkat makro, kinerja sektor pertanian antara lain ditandai pertumbuhan positif dalam struktur PDB yang mencapai 2.5 persen dengan kontribusi sekitar 11.4 persen dari total PDB pada tahun 2005 (tidak termasuk kehutanan dan perikanan). Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh subsektor peternakan (2.9 %), tetapi kontribusi terbesar berasal dari subsektor tanaman pangan (7.2%). Selama tahun 2005 hingga pertengahan tahun 2006, tidak terdapat insiden kekurangan ketersediaan pangan. Bahkan neraca kecukupan beras menunjukkan surplus yang meningkat. Selisih antara perkiraan produksi dan konsumsi beras meningkat dari 69.3 ribu ton menjadi 110.0 ribu ton pada periode di atas.

Di pedesaan sektor pertanian menjadi tumpuan hidup sebagian besar penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin di sektor pertanian mencapai 55 persen dari total penduduk miskin. Sekitar 75 persen dari mereka terlibat dalam kegiatan subsektor tanaman pangan. Di sisi lain, besaran nilai tukar petani (NTP) meningkat dari 96.9 pada tahun 2000 menjadi 102.9 pada tahun 2004. Untuk tahun 2005 NTP menurun menjadi 100.8 (tahun 1993=100). Situasi tersebut mengindikasikan bahwa rumahtangga pertanian mengalami peningkatan kesejahteraan selama periode 2000-2004, tetapi tingkat kesejahteraan tersebut kemudian cenderung menurun kembali pada tahun 2005. Penurunan kesejahteraan petani diduga akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Pada tahun 2005 terjadi kecenderungan peningkatan produksi pertanian. Produksi tanaman padi, misalnya, meningkat 0.1 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan juga terjadi pada produksi jagung, kedelai, atau ubi kayu. Pada komoditas hortikultura, produksi tanaman hias meningkat 5.8 persen dalam kurun 2004-2005. Produksi tanaman biofarmaka meningkat 6.7 persen. Adapun produksi buah-buahan dan sayuran cenderung menurun pada periode yang sama. Untuk komoditas perkebunan, produksi tebu, kelapa sawit, dan karet

meningkat masing-masing 9.3 persen, 6.3 persen, dan 3.0 persen. Akan tetapi untuk tanaman kelapa, kopi, teh, lada, cengkeh, kakao, dan jambu mete relatif tetap. Pada komoditas peternakan, hampir semuanya mengalami peningkatan produksi dalam periode 2004-2005, khususnya untuk ayam pedaging (meningkat 10.9 %). Namun demikian epidemi flu burung yang berjangkit sejak tahun 2003 menjadi ancaman serius pengembangan industri peternakan khususnya unggas.

Visi dan Misi Pembangunan Pertanian

Tujuan akhir pembangunan pertanian adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat pertanian melalui sistem pertanian industrial. Oleh sebab itu orientasi pembangunan pertanian dalam jangka panjang adalah pada peningkatan kualitas hidup masyarakat pertanian. Sasaran pembangunan pertanian dalam jangka panjang adalah: (1) terwujudnya sistem pertanian industrial yang berdayasaing, (2) mantapnya ketahanan pangan secara mandiri, (3) terciptanya kesempatan kerja penuh bagi masyarakat pertanian, dan (4) terhapusnya kemiskinan di sektor pertanian dan tercapainya pendapatan petani US \$ 2500 per tahun.

Mengacu pada sasaran pembangunan di atas maka rumusan visi pembangunan pertanian dalam jangka panjang adalah "terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdayasaing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesejahteraan petani". Selanjutnya, agar proses dan kemajuan pembangunan dapat terlihat, Departemen Pertanian telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah (2005-2009). Untuk periode tersebut visi pembangunan pertanian adalah "terwujudnya pertanian tangguh untuk pemantapan ketahanan pangan dan daya saing produk pertanian serta peningkatan kesejahteraan petani".

Untuk mencapai visi di atas Departemen Pertanian mengemban misi : (1) mewujudkan birokrasi pertanian yang profesional dan memiliki integritas moral tinggi, (2) mendorong pembangunan pertanian yang tangguh dan berkelanjutan, (3) mewujudkan ketahanan pangan melalui peningkatan produksi dan penganekaragaman konsumsi, (4) mendorong peningkatan peran sektor pertanian terhadap perekonomian nasional, (5) meningkatkan akses pelaku usaha pertanian terhadap sumberdaya dan pelayanan, dan (6) memperjuangkan kepentingan dan perlindungan terhadap petani dan pertanian dalam sistem perdagangan domestik dan global.

Kebijakan Pembangunan Pertanian Sektoral

Kebijakan Pengelolaan Lahan dan Air.

Sesuai dengan peran dan fungsinya dalam sistem produksi pertanian, perumusan kebijakan pengelolaan lahan dan air diarahkan pada upaya mendukung peningkatan keterjaminan ketersediaan pangan. Isu utama dalam pengelolaan kedua sumberdaya ini antara lain adalah: semakin tidak terkendalinya laju alih fungsi lahan, infra struktur yang belum tertata pada kawasan pertanian terutama lahan kering, masih luasnya areal lahan terlantar, degradasi lahan yang berlanjut, ketidakseimbangan permintaan air dengan

kemampuan penyediaannya, persaingan penggunaan air yang makin ketat, penggunaan air irigasi belum efisien dan keandalan air cenderung menurun, penurunan fungsi infrastruktur irigasi, kelembagaan petani yang lemah, pemanfaatan potensi sumberdaya air untuk pertanian belum optimal, ancaman kelestarian sumberdaya air, dan masih rendahnya akses lahan kering dan tadah hujan terhadap sumber air.

Kebijakan spesifik dalam pengelolaan lahan dan air meliputi: (1) pengendalian laju alih fungsi lahan; (2) konsolidasi penguasaan lahan (*Corporate farming*), kebijakan reformasi agraria dan sebagainya, (3) koordinasi program dengan instansi Badan Pertanahan melalui mekanisme sejenis Prona dan melakukan proses hukum pertanahan secara tegas dan adil, (4) penataan infrastruktur pada kawasan pertanian terutama pada lahan kering, (5) peningkatan luas areal pertanian (6) pendayagunaan lahan pertanian terlantar (7) upaya konservasi dan rehabilitasi lahan pertanian (8) pengembangan sumber air alternatif dan skala kecil secara berkelanjutan secara partisipatif, (9) optimasi pemanfaatan air irigasi dengan peningkatan fungsi prasarana irigasi, penerapan teknologi hemat air dan peningkatan partisipasi masyarakat, (10) upaya konservasi air dengan melakukan pemanenan air hujan, peningkatan partisipasi masyarakat, fasilitasi sarana prasarana konservasi air, serta antisipasi kekeringan dan kebanjiran, (11) pemberdayaan pengelolaan air melalui pengembangan kelembagaan petani secara *bottom-up*, partisipatif dan berakar kepada budaya lokal, (12) meningkatkan koordinasi kelembagaan penanganan masalah lahan dan air, (13) peningkatan kualitas SDM pertanian dalam pengelolaan lahan dan air melalui peningkatan *capacity building* petugas dan petani.

Kebijakan Pengembangan Tanaman Pangan

Perumusan kebijakan pengembangan tanaman pangan dimaksudkan untuk mendukung upaya peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan. Departemen Pertanian telah menetapkan prioritas pengembangan komoditas utama tanaman pangan meliputi: padi, jagung, kedelai, ubi kayu dan kacang tanah. Isu utama dalam pengembangan produksi tanaman pangan antara lain: menurunnya pertumbuhan produktivitas, meningkatnya alih fungsi lahan, gangguan OPT dan dampak anomali iklim, tingginya tingkat kehilangan hasil, lemahnya kelembagaan pertanian, kurangnya akses permodalan dan tidak stabilnya harga.

Langkah solutif peningkatan produksi tanaman pangan berupa kebijakan : (1) peningkatan produktivitas. Kegiatan operasional untuk mendukung upaya ini adalah penerapan pendekatan PTT (Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak), penyediaan sarana produksi, perbaikan mutu lahan, percepatan alih teknologi (benih bermutu, pupuk bio-hayati, PHT, alsintan), pengembangan varietas berpotensi untuk tanaman tertentu, dan pendampingan/pengawasan teknologi; (2) peningkatan luas tanam dan luas panen. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan indeks pertanaman (IP), penambahan baku lahan dan pengamanan produksi; (3) Penanggulangan OPT dan dampak anomali iklim; (4) penguatan kelembagaan melalui revitalisasi penyuluhan, revitalisasi perbenihan, pengembangan kemitraan, pengembangan kelompok tani, gabungan kelompok

tani, serta koperasi tani, dan pemberdayaan unit pengelolaan jasa alsintan (UPJA); (5) bantuan permodalan; dan (6) regulasi, termasuk tarififikasi dan pengaturan harga.

Kebijakan Pengembangan Hortikultura

Perumusan kebijakan pengembangan komoditas hortikultura dilakukan dengan pendekatan komprehensif, memperhatikan keseluruhan aspek dan segmen agribisnis dari hulu ke hilir dan perangkat penunjangnya, serta menuju keseimbangan antara usaha promosi peningkatan konsumsi, produksi dan distribusi yang menguntungkan semua pihak. Selain peningkatan produksi, strategi pembangunan hortikultura juga mencakup peningkatan mutu produk, pengembangan kelembagaan, peningkatan kompetensi SDM dan peningkatan akses pasar.

Pengembangan hortikultura masih menghadapi sejumlah masalah. Beberapa diantaranya terkait dengan produktivitas dan mutu produk yang masih rendah, keterbatasan modal dan ketrampilan petani, kelembagaan petani belum optimal, pengendalian OPT belum optimal, ketersediaan dan penggunaan benih bermutu relatif rendah, skala usaha terlalu kecil, konsumsi masih rendah, dan sistem pemasaran yang belum berpihak kepada petani.

Kebijakan solutif untuk menunjang pengembangan produksi hortikultura antara lain: (1) pengembangan komoditas unggulan. Berdasarkan pertimbangan beberapa faktor telah ditetapkan komoditas unggulan hortikultura yang meliputi: pisang, mangga, manggis, jeruk, durian, kentang, cabe merah, bawang merah dan anggrek/tanaman hias, (2) pengembangan kawasan. Pengembangan ini dilakukan untuk menyatukan dan menjalin kerjasama antara produsen dan pelaku usaha lain, serta antar dan inter sentra produksi dengan sentra pemasaran yang memiliki karakteristik sumberdaya dan pendekatan penanganan yang sama, (3) pengembangan mutu produk. Secara bertahap produk hortikultura diarahkan untuk memenuhi standar mutu, baik untuk konsumsi, bahan baku industri maupun ekspor, (4) pengembangan perbenihan dan sarana produksi untuk meningkatkan ketersediaan benih bermutu varietas unggul dari industri benih nasional, (5) pengembangan perlindungan tanaman yang diarahkan pada penerapan prinsip pengendalian hama terpadu; (6) pengembangan kelembagaan, baik di tingkat petani maupun wilayah; (7) peningkatan kompetensi petugas dan petani, (8) pemasyarakatan produk, (9) pengembangan sistem informasi manajemen, (10) perbaikan dan penyempurnaan regulasi, (11) peningkatan investasi, dan (12) pengembangan manajemen hortikultura.

Kebijakan Pengembangan Komoditas Perkebunan

Pembangunan perkebunan secara umum diarahkan pada pemberdayaan sektor hulu dan penguatan sektor hilir guna menciptakan nilai tambah dan daya saing usaha perkebunan. Isu utama pengembangan perkebunan antara lain menyangkut rendahnya produktivitas tanaman karena keterbatasan penggunaan bibit unggul dan sarana produksi lain, serangan OPT, kurangnya infrastruktur pendukung, penguasaan teknologi pengolahan hasil rendah sehingga mutu produk

rendah, diversifikasi usaha terbatas, ekspor didominasi produk primer, pendanaan untuk investasi maupun produksi serta kebijakan pendukung yang kondusif relatif kurang.

Secara teknis, kebijakan pembangunan perkebunan meliputi: (1) pengembangan komoditi melalui optimasi aset perkebunan yang sudah ada dan pengembangan baru. Operasionalisasi kebijakan ini dilakukan melalui intensifikasi, rehabilitasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi paket teknologi budidaya yang baik; revitalisasi komoditas prioritas utama (kelapa sawit, karet dan kakao), pengembangan tanaman penghasil bahan baku Bahan Bakar Nabati (jarak pagar, kelapa sawit, kelapa), pengembangan kelapa terpadu, akselerasi peningkatan produktivitas tebu, pengembangan komoditas potensial lainnya, penyediaan sarana dan prasarana pendukung, pengembangan sistem informasi pasar, manajemen dan permodalan; (2) pengembangan sumberdaya manusia, (3) penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif, (4) peningkatan dukungan terhadap pengembangan sistem ketahanan pangan, (5) pengembangan bahan baku bahan bakar nabati melalui penyediaan sumber benih unggul, bahan baku bahan bakar nabati, sosialisasi pengembangan tanaman bio energi dan pengembangan unit pengolahan sederhana di kelompok tani, (6) pengembangan dukungan terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, dan (7) pengembangan kelembagaan dan kemitraan usaha.

Kebijakan Pengembangan Komoditas Peternakan

Kebijakan pengembangan komoditas peternakan diarahkan pada: (1) upaya pemenuhan kecukupan daging sapi, (2) kecukupan susu nasional, (3) inisiasi ekspor kambing/domba ke Timur Tengah, dan (4) peningkatan kapasitas produksi perunggasan. Dengan dukungan kebijakan tersebut sasaran pembangunan peternakan yang ingin dicapai adalah peningkatan konsumsi daging dari 6.3 kg menjadi 8.3 kg/kap/tahun; peningkatan konsumsi susu dari 7.0 kg menjadi 8.1 kg/kap/tahun; peningkatan konsumsi telur dari 4.9 kg menjadi 5.6 kg/kap/tahun; peningkatan pendapatan; peningkatan dan pengembangan infrastruktur kelembagaan; penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Implementasi kebijakan pengembangan peternakan diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan antara lain: peningkatan inseminasi buatan untuk mendorong produktivitas sapi potong, peningkatan populasi dan reproduksi, pengendalian pemotongan betina produktif, penanganan gangguan reproduksi sapi potong, bantuan modal investasi, penanganan dampak penyakit flu burung (*Avian Influenza, AI*) pada unggas, penanggulangan penyakit AI, restrukturisasi perunggasan melalui *introduksi village poultry farming* dengan menerapkan bio-security yang ketat.

Kebijakan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

Pengolahan dan pemasaran hasil pertanian mencakup kegiatan pengembangan pasca panen dan peningkatan mutu, agroindustri pedesaan dan pemasaran hasil pertanian. Isu utama dalam pengolahan dan pemasaran hasil pertanian antara lain : kemampuan dan pengetahuan terbatas, posisi tawar

petani lemah, kelembagaan pasca panen yang belum berkembang, terbatasnya alat dan mesin pasca panen dan pemanfaatan yang belum optimal, kemitraan usaha yang belum berkembang, lemahnya standar penanganan pasca panen dan mutu hasil pertanian, kelembagaan pemasaran milik kelompok tani yang belum berkembang dan akses pasar luar negeri yang lemah.

Pembangunan bidang pengolahan hasil dan pemasaran hasil pertanian diarahkan untuk menurunkan tingkat kehilangan hasil pertanian, meningkatkan mutu hasil pertanian yang terukur, meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk serta peningkatan diplomasi dalam perumusan standar internasional. Sasaran lain adalah peningkatan kelembagaan pengolahan hasil pertanian, pengembangan industri pengolahan bio-energi di desa langka BBM, sub terminal agribisnis, kemitraan petani dengan industri, diplomasi yang menguntungkan dengan negara mitra dagang, peningkatan pangsa pasar pertanian, dan regulasi promosi dan proteksi produk pertanian.

Kebijakan solutif yang dirancang meliputi pembinaan dalam kelembagaan pasca panen dan mutu, pengembangan teknologi, pendampingan dan penguatan modal usaha, fasilitasi sarana pasca panen dan peningkatan mutu, dan kualitas SDM. Kebijakan lain berupa pengembangan regulasi, standarisasi dan sertifikasi hasil pertanian.

Kegiatan Utama Tahun 2007

Departemen Pertanian telah menetapkan tiga program utama pembangunan pertanian yang sesuai dengan RPJM 2005-2005, yaitu: (1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan, (2) Program Pengembangan Agribisnis, dan (3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani. Guna mendorong pencapaian ketiga program tersebut pada tahun 2007 Departemen Pertanian menetapkan untuk memberikan prioritas terhadap pelaksanaan 28 kegiatan utama. Untuk Pelaksanaan 28 kegiatan utama tersebut telah direncanakan untuk mengalokasikan anggaran sekitar Rp 8.2 trilyun.

Secara lengkap 28 kegiatan tersebut adalah: (1) pembentukan dan pengaktifan kelompok tani & gapoktan, (2) pengembangan benih bersubsidi kepada petani miskin, (3) penjaminan kredit pertanian, (4) subsidi bunga modal investasi, (5) stabilisasi/kepastian harga komoditas primer melalui DPM-LUEP, (6) penguatan kelembagaan ekonomi petani melalui PMUK & LM3, (7) pengembangan bahan baku Bio-Energi, (8) penyediaan dan perbaikan infrastruktur pertanian, (9) penguatan kelembagaan perbenihan/perbibitan, (10) perbaikan mekanisme subsidi pupuk, (11) pengendalian OPT, penyakit hewan dan perkarantinaan, (12) pengembangan kegiatan magang SL Pertanian, (13) peningkatan kapasitas SDM petani dan revitalisasi penyuluhan, (14) pengembangan kegiatan pelatihan pertanian, (15) mekanisasi kegiatan produksi komoditas pertanian primer (pra panen), (16) mekanisasi kegiatan pertanian pasca panen, (17) revitalisasi UPJA dan Kelompok UPJA (KUPJA), (18) pengembangan agroindustri pedesaan, (19) pengembangan kegiatan pemasaran komoditas pertanian, (20) pengembangan fasilitas pelayanan terpadu agribisnis, (21) peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, (22) peningkatan kegiatan eksebsi, perlombaan dan penghargaan pertanian, (23) pengembangan pusat pembibitan sapi, (24)

Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak, kompos dan biogas, (25) pengembangan pertanian organik dan lingkungan hidup, (26) peremajaan tanaman perkebunan rakyat (karet, kopi, sawit, kakao, mete), (27) pengembangan dan diseminasi inovasi mendukung pembangunan pertanian, (28) penerapan dan pemantapan prinsip *Good Governance*, kebijakan dan regulasi.

Dukungan Terhadap Implementasi Otonomi Daerah

Potensi pertanian di Indonesia tersebar di berbagai penjuru wilayah. Berdasarkan fakta empiris, sektor pertanian masih mendominasi perekonomian di sebagian besar daerah di Indonesia. Selain penyumbang utama Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian di daerah dibutuhkan sebagai penyedia pangan untuk penduduk dan industri setempat yang berkembang. Oleh sebab itu dalam perencanaan pembangunan di daerah sektor pertanian hampir senantiasa menjadi fokus perhatian.

Sejak memasuki era otonomi, kebijakan pembangunan komoditas pertanian sebenarnya sudah diarahkan pada upaya pengembangan daerah. Pelaksanaan program pengembangan komoditas spesifik lokasi secara tidak langsung merupakan dukungan terhadap kepentingan daerah dalam mengoptimalkan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki. Selain itu, dukungan Departemen Pertanian terhadap otonomi daerah juga direalisasikan melalui pola penyusunan program pembangunan yang telah mengakomodasi usulan-usulan daerah dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan pertanian (Musrenbangtan). Pola musrenbangtan yang seperti itu memberi kesempatan kepada setiap daerah untuk mengembangkan komoditas pertanian yang sesuai. Usulan-usulan pengembangan komoditas tersebut tentunya sudah didasarkan pada beberapa pertimbangan, seperti kesesuaian agroklimat, peluang pasar, maupun sumberdaya manusia yang tersedia.

Setiap daerah memiliki potensi sumberdaya dan preferensi komoditas yang berlainan. Oleh sebab itu dalam proses pengusulan pengembangan komoditas melalui musrenbangtan dari setiap daerah dapat berbeda-beda. Hasil Musrenbangtan 2006 menunjukkan, komoditas yang dianggap penting untuk dikembangkan di berbagai daerah adalah padi, jagung, sapi potong, dan jeruk. Indikasi ini tercermin dari tingginya preferensi usulan pengembangan keempat komoditas tersebut yang diajukan oleh masing-masing perwakilan daerah. Pengembangan komoditas yang diusulkan dari daerah tentunya perlu disesuaikan dengan tujuan pengembangan secara nasional agar tujuan pembangunan pertanian diharapkan dapat dicapai secara maksimal.

Dukungan Departemen Pertanian terhadap implementasi otonomi daerah juga terlihat dari pangsa alokasi anggaran untuk daerah yang cukup besar. Dari total alokasi anggaran untuk pusat dan daerah untuk tahun 2007 yang berjumlah Rp 14.627.8 milyar, proporsi alokasi untuk pemerintah provinsi dan kabupaten/kota masing-masing sebesar 20.5 persen dan 62.4 persen (Tabel 1). Alokasi anggaran ke daerah disalurkan dalam bentuk Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan non-fisik di propinsi, dana Tugas Pembantuan yang disalurkan ke provinsi untuk kegiatan fisik lintas kabupaten/kota, dan Dana Tugas Pembantuan yang disalurkan ke kabupaten/kota untuk kegiatan fisik dan operasionalnya.

Tabel 1. Rencana Alokasi Anggaran Tahun 2007 untuk Pusat dan Daerah

No	Peruntukan	Nilai (Milyar Rupiah)	Persentase (%)
1.	Pusat	2.500,00	17,09
2.	Propinsi	3.000,00	20,51
3.	Kabupaten/Kota	9.127,83	62,40
4.	Total	14.627,83	100,00

Penutup

Memperhatikan peran sektor pertanian dalam perekonomian nasional yang strategis diperlukan reorientasi kebijakan untuk menempatkan kembali sektor ini sebagai sektor andalan. Untuk mendorong peningkatan peran nyata sektor pertanian terhadap peningkatan laju perekonomian di tingkat makro maupun peningkatan kesejahteraan petani di tingkat mikro, diperlukan pemberdayaan (revitalisasi) agar terjadi akselerasi peningkatan produksi dan produktivitas serta daya saing produk dan kemampuan para pelaku usaha pertanian.

Seiring dengan perubahan tata hubungan antar lembaga negara yang terjadi sejak era reformasi dalam menjalankan pemerintahan, keberhasilan pembangunan pertanian ke depan tidak dapat hanya mengandalkan kerja keras Departemen Pertanian saja. Dukungan dan koordinasi dengan lembaga lain, termasuk lembaga legislatif, khususnya dalam mengupayakan kebijakan terobosan untuk meningkatkan kinerja pertanian mutlak dibutuhkan. Terlebih bila kita sungguh-sungguh ingin memperbaiki kehidupan para petani serta menghindarkan mereka dari keterpurukan ekonomi maupun finansial.